



MATRIK KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN
KECAMATAN SUNGAI LOBAN, KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS (SARGIS)	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)*	INDIKATOR KINERJA SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)*	IKU / BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)*	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)*	SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)*	ANGGARAN (Rp)		KET
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban	Y	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%)		IKU	1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi (%)		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terjalinnnya Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dalam rangka menjaga Trantibum	Jumlah koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (kali)		33.738.600	-	
															Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kali)			-	
											Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya fasilitasi Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Kali)		75.820.400	-	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Y	Indeks Kepuasan Masyarakat		IKU	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Kegiatan Pemerintahan bersama Bappeda, Bagian Pemerintahan Setda,	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Instansi Vertikal (Kali)		12.431.300	-	
															Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Diterbitkannya SOP Penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Jumlah SOP Penyelenggaraan pemerintahan yang diterbitkan (Dokumen)			-	
											Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (%)		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Diterbitkannya SOP Pelayanan Publik untuk meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Sop Pelayanan Publik (Dokumen)		13.177.500	-	
											Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang difasilitasi (%)		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi bersinergi dengan Instansi Vertikal dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana layanan umum	Jumlah Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana layanan umum (Kali)		14.395.400	-	

														Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta (Unit)			-	
														Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Diterbitkannya Dokumen Pelayanan Perizinan, diantaranya : izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), Surat izin tempat usaha (SITU), Surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin penumoukan barang (IPB) dan izin usaha mikro kecil (IUMK)	Jumlah pelayanan perizininan diterbitkan (dokumen)		15.610.900	-	
														Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Diterbitkannya Dokumen Pelayanan Non Perizinan, diantaranya : Pengantar KTP, Pengantar KK, Pengantar Pindah penduduk, rekomendasi nikah, Registrasi ahli waris, rekomendasi SKCK, rekomendasi izin keramaian, Registrasi surat keterangan tidak mampu dan Registrasi proposal	Jumlah Pelayanan Non Perizinan diterbitkan (Dokumen)			-	
3	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Y	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		IKU	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan peran masyarakat dalam membangun kecamatan	Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi (%)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Monitoring dan pendampingan pelaksanaan pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan rencana kerja pembangunan desa	Jumlah usulan desa yang masuk ke kecamatan (MusrenbangKec.) (Dokumen)		389.242.600	-	
														Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang sinergi dengan pemerintah dan swasta, diantaranya : PKK,Lomba Desa,MTQ Kecamatan dan MTQ Kabupaten	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang sinergi dengan pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan (PKK,Lomba Desa,MTQ Kec/Kab (Dokumen)			-	

4	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Penyelenggaraan n Urusan Pemerintahan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Sosialisasi dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional (kali)		64.448.400	-	
									Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan persatuan dan Kesatuan Bangsa (kali)			-	
									Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Sosialisasi dalam rangka Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,Ras dan Golongan	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,Ras dan Golongan (kali)			-	
									Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Tertanganinya Konflik Sosial berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri dan TNI guna mendeteksi dini setiap kemungkinan konflik dengan mengaktifkan ronda dan peran Linmas	Jumlah Konflik Sosial yang tertangani (Konflik)			-	
									Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Terlaksananya Sosialisasi dalam rangka kesadaran berdemokrasi berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan (Kali)	Jumlah sosialisasi kesadaran berdemokrasi berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan (Kali)			-	
									Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dengan Forkopimca diantaranya Polsek, Koramil, KUA, Puskesmas, ULWK, berkenaan pelaksanaan tugas	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (kali)			-	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terbina dan terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kali)		64.322.700	-	
									Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (kali)			-	

